

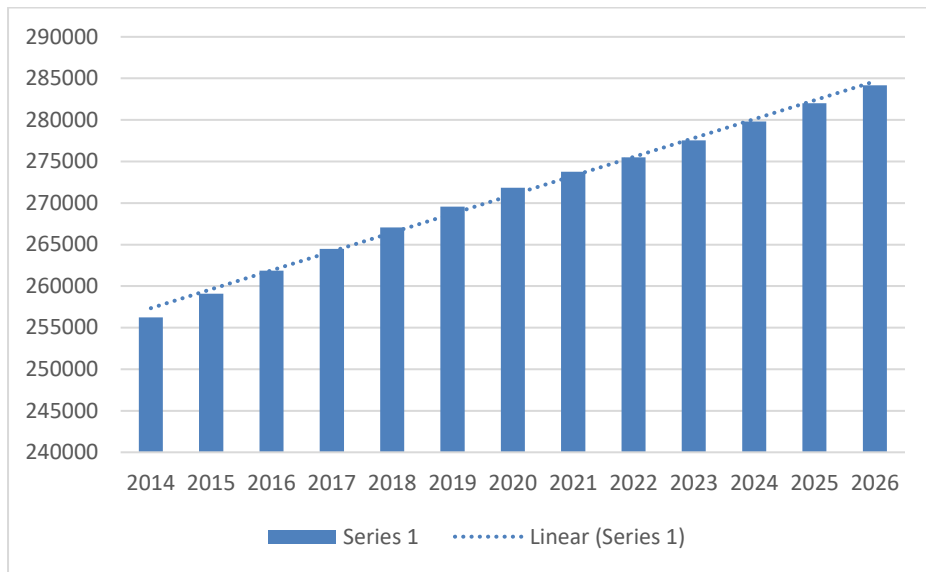
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat nomor empat didunia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, atau tepatnya 278,82 juta jiwa. Angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk yang terbagi atas pria dengan jumlah 140,8 juta jiwa dan wanita sebesar 137,9 juta jiwa. Angka tersebut diperoleh dari total penduduk yang berada diseluruh wilayah di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023). Ada dua dampak yang jelas dari populasi yang tinggi. Manfaatnya adalah peningkatan produksi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi karena melimpahnya tenaga kerja. Namun, jika tidak diimbangi dengan kuantitas lapangan kerja, infrastruktur, dan kualitas populasi, maka akan berdampak buruk. Selain menurunkan kesehatan masyarakat, hal ini akan menyebabkan kesenjangan sosial dalam bentuk pengangguran, kemiskinan, dan tindak kriminal (Ramadan, 2023).

Jumlah penduduk suatu negara merupakan sumber daya yang sangat berharga karena memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah. Program Keluarga Berencana menjadi representasi langkah pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk (Futum Hubaib, 2021). Bentuk dari inisiatif nasional dengan peranan yang sangat krusial untuk mencapai tujuan tersebut berupa program KB. Baik saat ini maupun di masa mendatang, program ini menentukan langkah krusial pemerintah dalam mengoptimalkan SDM yang ada (Yunianto, 2021). Berbagai upaya telah dilakukan akhir-akhir ini untuk bisa menjaga keselarasan antara program yang dicanangkan dengan hak-hak masyarakat secara spesifik seperti kesehatan reproduksi yang turut disesuaikan dengan dinamisnya zaman.

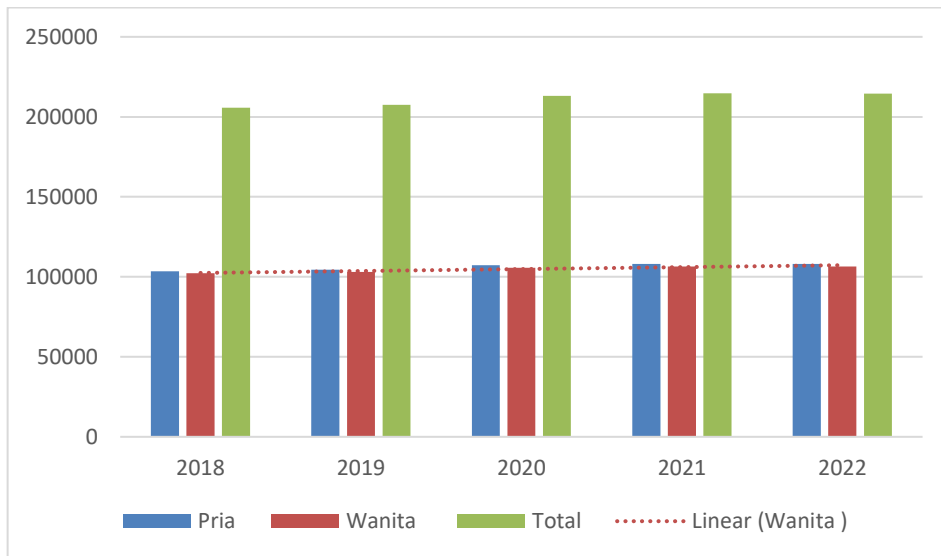


Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Sumber: (Macrotrends, 2023)

Berdasarkan data tersebut, Indonesia setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Sebagai negara berkembang, Indonesia turut menghadapi berbagai permasalahan sejumlah polemik yang dirasakan oleh negara dengan status yang sama dengan Indonesia. Negara-negara berkembang saat ini menghadapi tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai inisiatif pemerintah, termasuk meningkatkan infrastruktur ekonomi seperti memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan infrastruktur lainnya dan membina serta meningkatkan partisipasi publik melalui kesehatan dan pendidikan (Yusa' Farchan, 2022). Masalah kependudukan merupakan persoalan krusial yang dimulai dengan jumlah populasi yang terus berkembang dengan tanpa adanya kendali atau program yang terarah, minimnya kontribusi masyarakat secara umum dalam ranah membangun negeri sampai dengan pemenuhan konstitusi (Futum Hubaib, 2021).

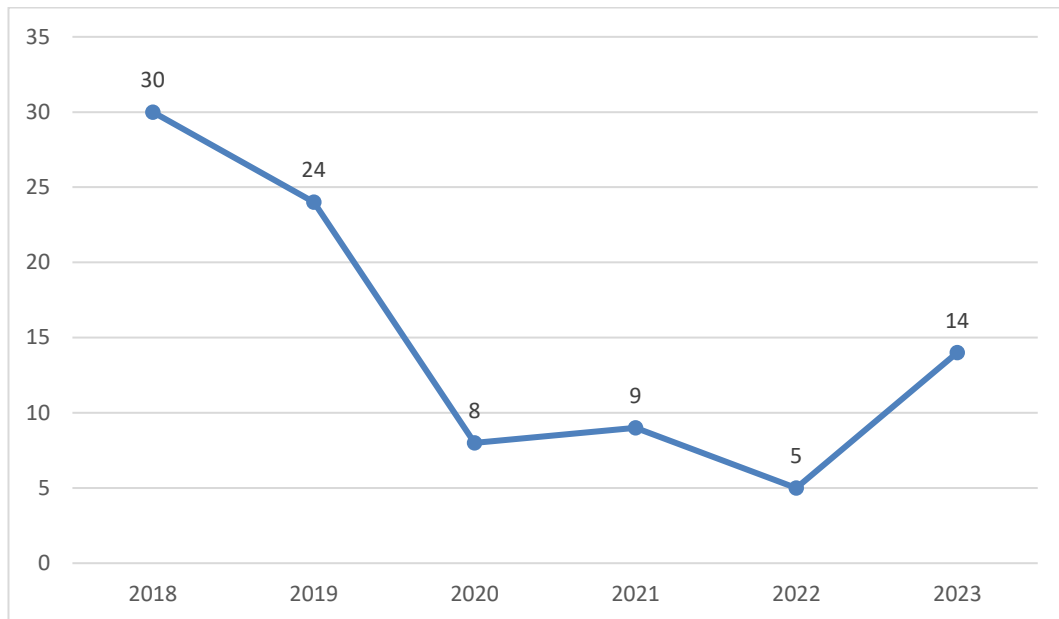
Untuk Kota Batu sendiri, setidaknya telah dihuni lebih dari 214.653 jiwa dengan perbandingan jumlah pria sebanyak 108.091 dan wanita sebanyak 106.562 jiwa. Adapun rincian pertumbuhan penduduk Kota batu adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Batu

Sumber: (BPS Kota Batu, 2021)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penduduk Kota Batu terus bertambah yang sampai dengan saat ini didominasi oleh masyarakat yang digolongkan sebagai generasi milenial dengan total lebih dari 26% dari keseluruhan penduduk yang terbagi atas tiga wilayah yaitu Junerjo, Bumiaji dan juga Batu. Jumlah wanita yang terdaftar sebagai penduduk Kota Batu terbilang besar yang bahkan jumlahnya hampir setara dengan jumlah penduduk laki-laki. Besarnya jumlah penduduk wanita di Kota Batu harus menghadapi kenyataan pahit terkait maraknya aksi kekerasan yang dihadapi oleh wanita dan anak di Kota Batu. Adapun rincian datanya sebagai berikut:

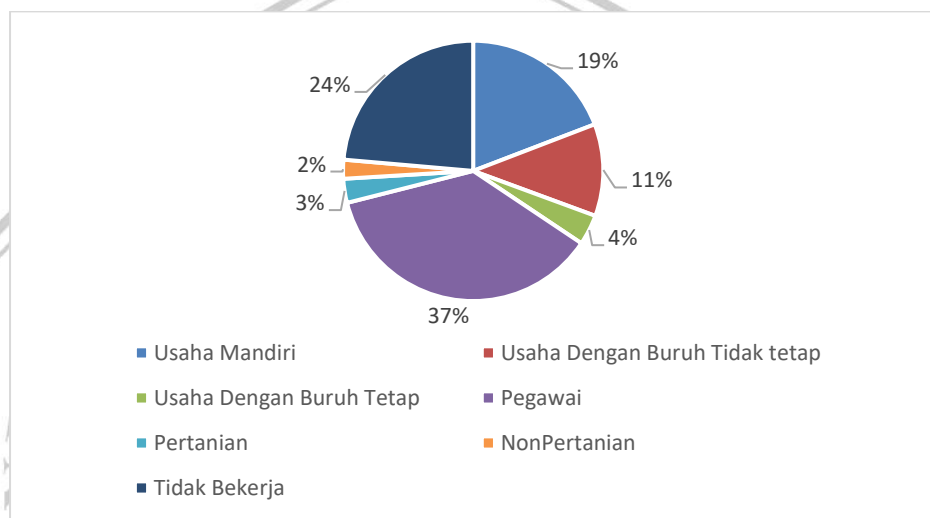


Gambar 1.3 Angka Kekerasan Terhadap Wanita

Sumber: Data Diolah KemenPPPA, 2024

Data kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, namun secara umum memperlihatkan tren penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2018 tercatat 30 kasus kekerasan, lalu menurun menjadi 24 kasus di tahun 2019. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 dengan hanya 8 kasus, dan sedikit meningkat menjadi 9 kasus pada tahun 2021, sebelum akhirnya turun lagi menjadi 5 kasus di tahun 2022, dan 14 kasus pada tahun 2023. Meskipun tren ini tampak positif, namun penurunan angka kekerasan tidak serta-merta mencerminkan menurunnya kejadian sebenarnya. Ada kemungkinan bahwa angka tersebut justru mencerminkan rendahnya pelaporan, ketakutan korban untuk mengungkapkan kasusnya, atau kurangnya akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan. Hal ini menimbulkan permasalahan penting untuk diteliti lebih lanjut, yakni apakah penurunan data ini benar-benar menunjukkan perbaikan kondisi atau justru menggambarkan lemahnya sistem deteksi dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan pelaporan kasus, efektivitas mekanisme perlindungan, serta persepsi korban terhadap keadilan dan keberanian untuk melapor.

Kekekrasan terhadap wanita yang umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga umumnya disebabkan persoalan perekonomian, yang diikuti dengan kejahatan seksualitas dan sejumlah penyebab kekerasan lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu untuk memitigasi fenomena tersebut adalah dengan memberdayakan wanita-wanita di Kota Batu agar bisa lebih berdaya, khususnya dari sisi ekonomi.



Gambar 1. 4 Keseharian Perempuan Dewasa Di Kota Batu

Sumber: (BPS Kota Batu, 2023b)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwasanya mayoritas wanita di Kota Batu berstatus sebagai pekerja dengan masing-masing pekerjaannya yang didominasi sebagai pegawai dengan jumlah lebih dari 17 ribu orang atau setidaknya 37% wanita di Kota Batu berstatus sebagai pegawai. Hanya saja, dilain sisi banyaknya wanita di Kota Batu yang bekerja, masih terdapat banyak pula wanita di Kota Batu yang hanya menghabiskan keseharian didalam rumah dan hanya mengerjakan pekerjaan rumah dengan jumlah lebih dari 11 ribu orang.

Masih terbukanya ruang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu dalam melakukan pemberdayaan terhadap wanita dengan lebih dari 11 ribu target program menjadi tugas yang harus dilakukan setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengingat

krusialnya peranan perempuan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Sebagai ibu, mereka memiliki pengaruh besar dalam mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, perempuan juga berkontribusi pada sektor ekonomi dan mengelola sumber daya alam secara terukur dan terarah.

Pemberdayaan yang dilakukan berangkat dari konsepsi mengenai pemberdayaan masyarakat yang menurut Jim Ife dalam (Raksun et al., 2022). Konsep pemberdayaan yang diterapkan berakar pada prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dimaknai sebagai proses memberikan akses kepada masyarakat lokal terhadap berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan arah masa depan sendiri, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berdampak pada kehidupan komunitas. Dalam konteks penelitian ini, perempuan menjadi kelompok sasaran utama dalam upaya pemberdayaan tersebut.

Pentingnya pemberdayaan terhadap wanita ditunjukkan dengan masih banyaknya wanita yang memiliki waktu luang dan tingginya angka kekerasan yang membuat wanita dikategorikan kedalam kelompok rentan. Keadaan ini sesuai dengan teori (Suharto, 2015 : 59-60) yang mengartikan pemberdayaan sebagai kemampuan individu, khususnya kelompok lemah dan rentan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta mengakses sumber-sumber produktif yang memungkinkannya mengakses barang dan jasa yang dibutuhkannya serta meningkatkan pendapatannya.

Karl M. In (Suyatna, 2019) juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan, dengan menyatakan bahwa hal itu dipandang sebagai upaya untuk bisa meningkatkan kesadaran sampai dengan peningkatan kapabilitas dari perempuan sehingga dapat terwujud kesetaraan dari semua pihak tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan dapat diberdayakan dengan meningkatkan kesadaran mereka dan membantu dalam pengembangan potensi mereka sehingga mereka dapat menjadi individu yang mandiri.

Tidak hanya mengedepankan konsep tersebut, pentingnya pemberdayaan terhadap wanita turut ditunjukkan dengan adanya Peraturan Walikota Batu Nomor

72 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak di Kota Batu. Peraturan daerah tersebut merupakan turunan dari adanya regulasi dengan cakupan yang lebih luas seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang juga merupakan bagian dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Santoso et al., 2019) dapat diketahui bahwasanya pemberdayaan terhadap perempuan menjadi hal yang krusial saat ini diseluruh belahan dunia. Karena pada dasarnya, dilakukannya pemberdayaan terhadap perempuan ditujukan agar para perempuan memiliki nilai intrinsik, serta mampu membuat keputusan hidup yang strategis. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian (Rosramadhana et al., 2024), dapat diketahui bahwasanya pemberdayaan terhadap para perempuan haruslah bersifat responsif gender yang tidak hanya melalui regulasi kebijakan tapi juga melalui gerakan dan perubahan substansial dalam pola pikir masyarakat. Kebijakan yang dibangun dengan mengakui peranan perempuan dan mengintegrasikan perlindungan sosial kedalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Uddin & Barua, 2024)

Sebagai contoh di negara Denmark, kesempatan yang sama bagi gender memiliki dampak positif yang substansial pada pendapatan per kapita, pembangunan ekonomi, dan daya saing nasional (Naveed et al., 2023). Bergvall (2024) menyatakan bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) global antara \$12 triliun dan \$28 triliun pada tahun 2025. Pengurangan kesenjangan gender dalam pekerjaan dan pendidikan juga memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, yang bergantung pada perluasan pasar tenaga kerja dan pengembangan keterampilan. Pekerjaan rumah tangga tanpa upah yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan juga penting bagi kesejahteraan sosial dan pemeliharaan tenaga kerja (Saluja et al., 2023).

Perlu dicatat juga bahwa peningkatan kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga, melalui pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan rumah tangga, dan mengurangi kerentanan keluarga terhadap pasang surut ekonomi (Saluja et al., 2023). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan perusahaan mengurangi risiko, meningkatkan produktivitas, dan memiliki efek positif pada nilai perusahaan. Penelitian (Yıldırım & Köroğlu, 2024) menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara perempuan dan pria di negara-negara Asia yang disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan sejak dini, khususnya mulai saat mengemban pendidikan di usia muda. Efek spillover yang cukup besar dari hak-hak ekonomi perempuan yang berasal dari negara-negara diluar Asia, yaitu sebesar 75%, sedangkan efek negara-negara di Asia sendiri dari hak-hak ekonomi perempuan hanya sebesar 25%.

Pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti wanita yang dibarengi dengan pemberdayaan untuk menekan angka kekerasan terhadap wanita serta membantu wanita untuk lebih berpartisipasi dalam kehidupan menjadi fokus Dinas Peemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu. Konsep dasar tersebut menjadi latar belakang dari penulisan penelitian mengenai **“KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah, menurut (Sugiyono, 2019) adalah pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian dan pengumpulan data. tergantung pada tingkat penjelasan, di mana penelitian dapat dilakukan. Konseptualisasi masalah sering kali memegang peranan penting.

1. Bagaimana dampak yang dibawakan dari adanya kebijakan pemberdayaan terhadap wanita di Kota Batu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Hasil dari peninjauan terhadap pertanyaan yang disuung dalam penelitian, ditetapkanlah sejumlah tujuan dari adanya penelitian yang dimaksudkan untuk mendalami kinerja DP3APPKB Kota batu. Adapun sejumlah tujuan yang ditetapkan, berupa:

1. Mengetahui dampak yang dibawakan dari adanya kebijakan pemberdayaan terhadap wanita di Kota Batu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini adalah menawarkan ide-ide untuk pembaharuan pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan, yang mampu menjadi referensi untuk penelitian kedepannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi Mahasiswa

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi penulis berupa tambahan wawasan serta pengalaman langsung yang diperoleh terkait dengan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Batu

Bagi Dinas PPPA Kota Batu

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari adanya penelitian berupa mampu menjadi rujukan dari pemerintah dalam proses penetapan kebijakan

Bagi Akademik

Manfaat praktis dari adanya penelitian terhadap dunia akademik adalah sumbangsih keilmuan mengenai pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan beserta manfaat yang dibawakan dari adanya pemberdayaan.

1.5. DEFINISI KONSEPTUAL

1.5.1. Kinerja Organisasi

Menurut Erlianti dan Fajrin (2021) “kinerja” merupakan padanan kata dari “performa” yang umumnya membawakan arti sebagai capaian, penampilan, atau wujud. Sementara menurut (Rifa’i & Susanto, 2021) mengartikannya sebagai tingkatan ketercapaian target secara berkesinambungan yang dapat merepresentasikan tingkat implementasi program, aktivitas, yang merepresentasikan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi sebagaimana dituangkan didalam perencanaan strategisnya. Kinerja organisasi mencerminkan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat bersifat fisik, seperti tenaga kerja dan infrastruktur, maupun non-fisik, seperti informasi, regulasi, dan strategi kebijakan yang diterapkan dalam operasional organisasi. Konsep kinerja organisasi juga menunjukkan bahwa semua organisasi publik melayani publik, dan bahwa kinerja mereka dapat dinilai menggunakan indikator kinerja yang saat ini digunakan untuk memastikan apakah organisasi telah memenuhi tanggung jawabnya dan mencapai tujuannya (Bisri & Asmoro, 2019).

1.5.2. Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (breakdown) dari hubungan antara subjek dan objek (Idrus et al., 2023). Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. Adapun tujuan dari adanya pemberdayaan adalah membantu pengembangan manusiawi yang autentik

dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Margayaningsih, 2018)

1.5.3. *Pemberdayaan Perempuan*

Gambaran umum pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membangun atau mentransfer kekuatan dan kapasitas dari individu atau kelompok yang telah memilikinya kepada mereka yang masih belum memiliki akses atau kemampuan tersebut. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, sosial, budaya, dan politik, agar mereka dapat meningkatkan kontrol atas hidupnya sendiri, membangun kepercayaan diri, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Pemberdayaan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pandangan diri yang lebih positif (Nur, 2019).

Pemberdayaan perempuan dicirikan oleh dua ciri. Pertama, sebagai ekspresi kepentingan yang membebaskan yang memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kemajuan secara keseluruhan. Kedua, sebagai metode untuk melibatkan orang atau masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses kesadaran, pencerahan, dan pengorganisasian kelompok (Sabariman et al., 2021)

1.5.4. *Perlindungan Anak*

Mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Perlindungan ini bertujuan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk hidup,

tumbuh, dan berkembang secara maksimal, serta dapat berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, perlindungan anak juga mencakup pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan anak juga berarti menjamin agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dan sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan memiliki kaitan langsung dengan perlindungan hak anak. Pertama-tama, kebijakan, inisiatif, dan kegiatan yang menjamin perlindungan hak anak dilandasi oleh pemahaman bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan tergantung, serta terdapat kelompok anak yang menghadapi tantangan dalam perkembangan sosial, fisik, dan spiritualnya (Wahyudi & Kushartono, 2020).

1.5.5. *Kebijakan Publik*

Kebijakan publik (public policy) merupakan konsep fundamental dalam kajian administrasi dan ilmu pemerintahan, yang berfungsi sebagai instrumen utama negara dalam menjawab berbagai persoalan publik. Secara konseptual, William N. Dunn (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”, yaitu serangkaian tindakan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan tertentu, yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah dalam merespons permasalahan publik. Menurut Dunn, kebijakan publik tidak dapat dipahami sebagai keputusan tunggal, melainkan sebagai proses multidimensional yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan (policy cycle). Proses ini bersifat dinamis karena kebijakan selalu berinteraksi dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang terus berubah (Dunn, 2018:3).

Lebih jauh, Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tiga karakter utama, yaitu normatif, analitis, dan empiris. Secara normatif, kebijakan berorientasi pada nilai dan tujuan moral mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Secara analitis, kebijakan memerlukan kajian sistematis tentang sebab, akibat, dan alternatif penyelesaian masalah publik. Sedangkan secara

empiris, kebijakan publik dapat diukur efektivitas dan efisiensinya berdasarkan hasil atau outcome yang dicapai (Dunn, 2018:5). Dengan demikian, kebijakan publik bukan hanya hasil keputusan politik, tetapi juga hasil analisis ilmiah yang mempertimbangkan bukti empiris dan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan.

Pandangan Dunn sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “whatever governments choose to do or not to do” — apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017:4). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik selalu melibatkan pilihan dan pertimbangan, baik dalam tindakan maupun dalam ketidaktindakan. Pilihan ini mencerminkan prioritas politik dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, James E. Anderson (2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. Anderson menekankan aspek stabilitas dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan bukanlah respon spontan, melainkan tindakan yang dirancang secara terencana dan konsisten untuk mencapai hasil tertentu dalam jangka waktu yang berkelanjutan (Anderson, 2015:6).

1.6. DEFINISI OPERASIONAL

Tujuan definisi operasional adalah untuk memperjelas makna frasa yang digunakan secara operasional dalam penelitian sehingga pembaca tidak akan bingung saat membaca. Secara operasional, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai kualitas, nilai, atau karakter suatu item atau aktivitas yang memiliki jenis atau variasi tertentu yang telah diidentifikasi dan diperiksa oleh peneliti sebelum penilaian dilakukan. Definisi operasional penelitian mengacu pada gagasan pemberdayaan dan kemandirian. Berikut ini adalah hal-hal spesifiknya:

1. Kebijakan publik

Terdapat berbagai macam indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kebijakan publik, sesuai dengan pengertian kebijakan publik dengan menggunakan teori William Dunn (2003) dalam (Rohayatin et al., 2018) Berikut ini adalah beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi:

a. Input Kebijakan

- 1) Indikator ini mengukur sumber daya yang dimasukkan atau digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan atau program yang dalam hal ini adalah DP3AP2KB Kota Batu dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan setempat. Untuk bisa melakukannya didapati sejumlah poin penting yang perlu ditinjau, seperti:
 - a) Kualitas riwayat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai DP3AP2KB Kota Batu selaku pihak yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan
 - b) Ketersediaan infrastruktur, sarana serta prasarana yang dimiliki oleh DP3AP2KB Kota Batu guna menunjang keberlangsungan proses perlindungan serta pemberdayaan terhadap perempuan
 - c) Ketersediaan serta realisasi anggaran yang menunjang keberlangsungan proses perlindungan serta pemberdayaan terhadap perempuan

b. Process Kebijakan

- 1) Indikator ini mengukur kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, sering disebut sebagai implementasi atau aktivitas. Adapun sejumlah sub indikator penunjang proses kebijakan adalah:
 - a) Peninjauan terhadap bentuk koordinasi antar lembaga dengan memperhatikan lembaga apa saja yang turut berpartisipasi menunjang keberlangsungan program sertapermananya
 - b) Peninjauan terhadap ketersediaan mekanisme pelayanan atau SOP yang jelas dari setiap program yang diselenggarakan

c. Output

- 1) Indikator ini mengukur hasil langsung, nyata, dan segera dari aktivitas yang dilakukan (*process*)

- a) Peninjauan terhadap realisasi anggaran yang telah tersedia untuk keberlangsungan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Batu
- b) Meninjau rata-rata ketercapaian kerja DP3AP2KB dari hasil realisasi anggaran
- d. Outcome
 - 1) Indikator ini mengukur hasil antara (jangka pendek hingga menengah) di tingkat kelompok sasaran atau masyarakat sebagai akibat dari *output*
 - a) Aspek utama yang ditinjau adalah Indeks pemberdayaan gender di Kota Batu
 - b) Aspek lain yang ditinjau adalah tren kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Batu
- e. Impact
 - 1) Indikator ini mengukur hasil akhir jangka panjang atau perubahan luas yang terjadi di masyarakat sebagai konsekuensi dari *outcome*.
 - a) Tinjauan terhadap jumlah penerima layanan dari DP3AP2KB Kota Batu serta dampak dari adanya layanan yang diberikan terhadap para perempuan di Kota Batu

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya berdasarkan objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menguraikan suatu situasi atau fenomena secara sistematis dan kemudian dianalisis guna memperoleh pemahaman yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi suatu isu secara menyeluruh dalam konteks ilmu tertentu. Penelitian kualitatif berupaya memahami peristiwa atau gejala dalam kondisi alaminya, dengan memberikan gambaran mendalam tentang situasi yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini juga diterapkan pendekatan studi kasus, yakni suatu strategi riset yang menitikberatkan pada eksplorasi mendalam terhadap sebuah program, kegiatan, peristiwa, atau fenomena yang berlangsung dalam lingkup individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan

tujuan memperoleh pemahaman yang holistik terhadap subjek yang diteliti. (Mudjia Rahardjo, 2019).

Pendekatan yang penting dalam studi kasus adalah memungkinkan pemeriksaan suatu kondisi sosial untuk memberikan wawasan (pengetahuan) tentang mekanisme yang menjelaskan bagaimana skenario tertentu terjadi. Gaya studi ini paling sering digunakan dalam ilmu sosial dan dicirikan sebagai fleksibel. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dalam bentuk "bagaimana" dan "mengapa".

1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu yang dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan November. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan Juli	Bulan Agustus	Bulan September	Bulan Oktober	Bulan November
Persiapan					
Observasi Lapangan					
Penelitian dan Olah Data					
Menyusun Laporan Penelitian					

1.7.3. *Sumber Data*

Adapun peneliti menggunakan dua macam jenis data, diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Sumber data utama menurut Sugiyono (2018) adalah informasi yang peneliti peroleh atau himpun langsung dari sumbernya berupa informasi baru atau terkini atau informasi yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pegawai DP3AP2KB Kota Batu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh peneliti melalui perantara atau pihak lain, bukan dari hasil pengamatan atau interaksi langsung di lapangan. Dengan kata lain, data ini bersifat tidak langsung karena telah dikumpulkan dan disajikan sebelumnya oleh pihak lain. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengguna data yang telah tersedia (*second-hand data*) (Sugiyono, 2018), Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup dokumen-dokumen resmi seperti Laporan Kinerja, Rencana Kerja, serta sejumlah arsip dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari DP3AP2KB Kota Batu sebagai lokasi penelitian.

1.7.4. *Teknik Pengumpulan Data*

a. Observasi

Salah satu upaya ilmiah empiris yang berlandaskan pada fakta dan teks lapangan adalah observasi, yaitu dengan menggunakan panca indera tanpa perlu adanya manipulasi (Nurdin, 2019). Program pemberdayaan perempuan di lingkungan masyarakat yang dilakukan DP3AP2KB Kota Batu dapat dikaji secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi ini.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dijadikan sebagai salah satu metode utama untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara langsung melalui interaksi tatap muka, yang

memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pandangannya secara lebih terbuka. Wawancara mendalam digunakan guna menggali secara detail berbagai aspek penting dari topik yang dibahas, sekaligus memperkaya dan melengkapi data yang telah dihimpun sebelumnya. Teknik ini dinilai efektif karena mampu menangkap nuansa subjektif dan konteks sosial yang sering kali tidak muncul melalui metode pengumpulan data lainnya.

c. Dokumentasi

Dengan menggunakan metode ini, peneliti mencoba mengumpulkan informasi dan dokumentasi pendukung, termasuk rekaman suara, foto, arsip, dan sumber daya terkait penelitian lainnya.

1.7.5. *Subyek Penelitian*

Partisipan dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan yang dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Partisipan penelitian ini meliputi DP3AP2KB Kota Batu, serta perwakilan dan pegawai yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan di kota tersebut.

1.7.6. *Teknik Analisa Data*

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan oleh DP3AP2KB Kota Batu dengan menggunakan teknik analisis data. Ketika peneliti ingin mengkonfirmasi dan menjelaskan informasi dari data yang dikumpulkan, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan terkait. Analisis data yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data

Menyusun ringkasan, mengorganisasikan, dan memfokuskan pada temuan-temuan kunci dari wawancara informan merupakan proses reduksi data. Data primer dan sekunder penelitian ini, yang dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diringkas oleh peneliti untuk memudahkan pemahaman dan lebih memfokuskan pada pokok bahasan dan penjelasan-penjelasan yang harus diberikan secara rinci untuk mendukung temuan-temuan dan percakapan-percakapan mengenai pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Batu.

b. Penyajian Data

Proses naratif digunakan untuk menampilkan data, bersama dengan sejumlah tabel, gambar, dan foto yang mendukung temuan. Dalam penelitian ini, temuan dari wawancara informan disesuaikan untuk mencerminkan indikator dan fenomena sosial yang terlihat di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Untuk memperoleh hasil data yang valid dan sesuai dengan analisis penelitian, kesimpulan diambil dengan menelusuri satu set data ke set data lainnya. Sebelum ada bukti yang andal dan konsisten di lapangan, proses penarikan kesimpulan awal mungkin bersifat sementara. Oleh karena itu, untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang jelas dan dipikirkan dengan matang, peneliti harus mengumpulkan bukti yang kuat dan andal.

